



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi PPM PKH dilaksanakan berdasarkan kinerja yang akuntabel sebagai proses berkelanjutan setiap tahunnya dengan kualitas yang semakin baik. Hal tersebut dilakukan dengan memastikan terukurnya setiap tahapan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan (proses), sampai dengan pencapaian keluaran (output) dari Indikator Kinerja pada Dokumen PK Kepala PPM PKH Tahun 2025. Seluruh sasaran kegiatan yang dituangkan dalam PK Kepala PPM PKH merupakan kinerja tahun pertama pada periode Renstra PPM PKH 2025-2029. Dalam mengawal ketercapaian kinerja PPM PKH, tim penyusun laporan kinerja melakukan pengumpulan data dukung sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam dokumen SOP. Dokumen SOP dan data dukung dimaksud sebagaimana pada Lampiran 4.

Guna memastikan capaian target, pendekatan monitoring dan evaluasi kegiatan PPM PKH dilakukan secara periodik mulai dari tahap perencanaan sampai akhir kegiatan melalui monitoring rencana aksi sebagaimana pada Lampiran 5. Hal ini dilakukan guna mendorong berjalannya fungsi pengawasan agar setiap kendala dan permasalahan dapat segera teridentifikasi, mendapatkan alternatif solusi, serta ditindaklanjuti sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui rapat rutin mingguan, pengendalian triwulanan, serta laporan perkembangan kegiatan, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Metode pelaksanaan rapat rutin manajemen sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana pada Lampiran 6. Metode-metode tersebut diaktualisasikan dengan memanfaatkan berbagai *tools* yang semakin diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan media digital baik dari *platform* yang telah tersedia maupun melalui pengembangan sendiri dalam bentuk aplikasi sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat berlangsung lebih aktual, efektif dan efisien.

Berdasarkan Surat Edara Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian, penetapan capaian kinerja dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori yakni sebagai berikut:

1. Sangat berhasil: capaian > 100%
2. Berhasil: capaian 80 – 100%
3. Cukup berhasil: capaian 60 – 79%
4. Kurang berhasil: capaian <60%

Berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025, kinerja PPM PKH menunjukkan rata-rata persentase capaian sebesar 100,62% atau dikategorikan **Sangat Berhasil** (>100%). Capaian rata-rata tersebut



diperoleh dari persentase capaian rata-rata 2 (dua) dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan yaitu: (1) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima sebesar 100,43% dan (2) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas sebesar 100,80%. Adapun Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas produk usahatani peternakan dan kesehatan hewan" dan "Meningkatnya adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian" tidak diperhitungkan karena tidak ada dukungan anggaran.

Kinerja PPM PKH dicapai melalui pemberdayaan sumber daya manusia sebagai *human capital* yang didukung dengan komitmen kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemberdayaan sumber daya berbasis output menjadi penekanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai rentang kendali antara rencana dan realisasi kegiatan yang meminimalkan gap capaian.

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100,62% atau dikategorikan **Sangat Berhasil** yang dihitung dari rata-rata capaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan. Pengukuran dari setiap indikator mengacu pada Manual IKU sebagaimana pada Lampiran 7. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja setiap Sasaran Kegiatan PPM PKH selama tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja PPM PKH Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria		
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani peternakan dan kesehatan hewan	1	Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi	-	-	-	-
2	Meningkatnya adopsi teknologi digital, <i>smart farming</i> dan modern" dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	2	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, <i>smart farming</i> dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan	-	-	-	-



Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria		
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	3	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,50 Nilai	86,87 Nilai	100,43	Sangat Berhasil
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	92,00 Nilai	92,74 Nilai	100,80	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Kinerja						100,62	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa dua target Indikator Kinerja capaian realisasinya di atas 100% sedangkan dua indikator lainnya yaitu "Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi" dan "Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan" tidak ada realisasi (-) karena pada tahun 2025 tidak ada alokasi anggaran untuk mendukung terlaksananya kedua indikator tersebut.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 *Meningkatnya kualitas produk usahatani peternakan dan kesehatan hewan*

Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi

Pada tahun 2025 PPM PKH tidak menargetkan output untuk Indikator Kinerja "Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi", sehingga tidak ada realisasi (-). Tidak ditetapkannya output indikator disebabkan oleh tidak adanya alokasi anggaran sebagai dampak dari diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 01 Tahun 2025. Indikator ini didukung oleh indikator kegiatan di level UPT yaitu "Jumlah produk usaha tani peternakan yang mendapatkan pembinaan" yang juga tidak ditetapkan targetnya dengan alasan yang sama.



Penyesuaian tugas dan fungsi pasca transformasi menjadi kendala dalam pencapaian target indikator sasaran ini. Kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2025 sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan tidak adanya alokasi anggaran dan berimplikasi pada pencapaian indikator ini. Langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja tahun 2026 adalah dengan melakukan pencermatan dan penajaman perencanaan terutama pada postur anggaran 2026 dengan mempertimbangkan prioritas RO yang mendukung ketercapaian Sasaran Kegiatan, dan mengidentifikasi potensi pendanaan di luar APBN.

Sasaran 2

Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan

Pada tahun 2025 PPM PKH tidak menargetkan output untuk Indikator "Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan", sehingga tidak ada realisasi (-). Indikator ini didukung oleh dua indikator di level UPT yaitu (1) Jumlah teknologi digital, smart farming dan modern peternakan yang tersedia dan (2) Indeks Pemanfaatan Teknologi Veteriner. Sama halnya dengan IKSK 1, pada IKSK 2 ini juga tidak memperoleh alokasi anggaran yang menyebabkan tidak adanya target output.

Sama halnya dengan IKSK 1, pencermatan dan penajaman perencanaan menjadi langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja tahun 2026 disamping juga dengan menjajaki peluang kerja sama yang dapat dilakukan baik dari dalam maupun luar negeri.

Sasaran 3

Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di seluruh UK/UPT lingkup BRMP dilakukan melalui penilaian mandiri. Penilaian dilakukan secara silang oleh tim penilai lingkup BRMP dengan aspek penilaian yang mengikuti kebijakan terbaru dalam Pembangunan ZI oleh Kementerian PAN RB. Perubahan kebijakan ditetapkan dalam rangka melakukan perbaikan kualitas hasil pembangunan dan evaluasi ZI secara berkelanjutan dengan lebih



melakukan penguatan terhadap peran aktor yang terlibat, sehingga hasil pembangunan ZI dapat berdampak langsung pada publik.

Kebijakan pembangunan ZI terbaru menggunakan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut, hanya mengubah pada syarat pengajuan UK/Satker Berpredikat menuju WBK/WBBM yang menitikberatkan pada aspek penilaian SAKIP baik terhadap Tingkat Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) maupun di level UK/Satker di bawahnya.

Adapun untuk penilaian Pembangunan ZI masih mengacu pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dengan 2 (dua) komponen penilaian yakni komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit dengan bobot nilai 60% memuat aspek pemenuhan dan reform yang didalamnya terdiri dari 6 (enam) area, yakni: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Tatalaksana; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Akuntabilitas Kinerja; (5) Penguatan Pengawasan; dan (6) Pelayanan Publik. Sementara itu, komponen hasil dengan bobot nilai 40% terdiri dari 2 (dua) area, yakni: (1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Berdasarkan Indikator Survey Persepsi Anti Korupsi dan Capaian Kinerja; dan (2) Pelayanan Publik yang Prima Berdasarkan Indikator Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI sebagaimana pada Lampiran 8.

Hasil evaluasi Pembangunan ZI merupakan capaian kinerja individu setiap UK/UPT. Berdasarkan evaluasi silang yang telah dilakukan, PPM PKH sebagai unit eselon II mendapatkan nilai Pembangunan ZI sebesar 86,87 sebagaimana Surat Keputusan Kepala BRMP Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana pada Lampiran 9. Dalam persentase, realisasi tersebut mencapai 100,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar 86,50. Capaian nilai Pembangunan ZI lingkup PPM PKH dideskripsikan pada Tabel 4.



Tabel 4. Nilai Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM UK/UPT Lingkup PPM PKH TA 2025

No	Satker	Target (Nilai)	Hasil Penilaian Mandiri	Capaian (%)	WBK	WBBM
1	PPM PKH	86,50	86,87	100,43	TL	TL
2	BBPM Veteriner	86,75	87,00	100,29	OK	OK
3	BPP Unggas	86,55	86,67	100,77	OK	OK
4	LPP Ruminansia Besar	86,90	87,28	100,43	OK	OK
5	LPP Ruminansia Kecil	86,55	86,89	100,39	OK	OK

Jika dijabarkan dari capaian keenam area perubahan, Pembangunan ZI di lingkup PPM PKH perlu diprioritaskan pada peningkatan capaian di area Penguatan Pengawasan sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Per Area Lingkup PPM PKH TA 2025

No	Area Perubahan	Bobot	PPM PKH	BBPM Vet	BPP Unggas	LPP RB	LPP RK
A.	Komponen Pengungkit (60%)	60,00	52,54	50,24	48,70	51,33	51,07
1.	Manajemen Perubahan	8,00	6,38	9,39	6,63	6,65	6,84
2.	Penataan Tata Laksana	7,00	6,64	4,79	5,31	5,31	5,98
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10,00	8,73	7,95	7,75	7,33	8,65
4.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	9,84	8,44	8,91	9,00	8,48
5.	Penguatan Pengawasan	15,00	11,64	11,95	11,96	13,16	12,56
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,31	7,72	8,16	9,89	8,57
B.	Komponen Hasil (40%)	40,00	34,33	36,76	37,96	35,95	35,82
I.	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50	19,33	21,01	20,90	20,16	19,98
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	15,01	15,75	17,06	15,79	15,84
	TOTAL NILAI	100,00	86,87	87,00	86,67	87,28	86,89

Dibandingkan dengan nilai Pembangunan ZI tahun sebelumnya, capaian PPM PKH tahun 2025 menurun 4,24 poin. Penurunan nilai capaian pembangunan ZI tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 terutama disebabkan oleh perubahan kelembagaan dari BSIP menjadi BRMP. Perubahan kelembagaan ini mengharuskan adanya penyesuaian pada dokumen pendukung terutama terkait perencanaan dan pengendalian yang membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Adapun capaian Nilai indikator tersebut selama 5 (lima) tahun sebagaimana disajikan pada Tabel 6.



Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja antar Tahun Indikator Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator		Nilai				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	T	84,50	85,00	85,25	86,50	86,50
		R	86,36	89,91	90,75	91,11	86,87
		%	102,20	105,78	106,45	105,33	100,43

Keterangan: T: target capaian indikator; R: realisasi capaian indikator; %: rasio target dan realisasi

Indikator “Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan” apabila dibandingkan dengan target Renstra PPM PKH 2025-2029 capaian tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 99,85% dalam pencapaian target akhir indikator yaitu 87,00 di tahun 2029 sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terhadap Target Renstra PPM PKH 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja		Nilai					Total	Capaian (%)
			2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	T	86,50	86,55	86,60	86,65	87,00	87,00	99,85%
		R	86,87	-	-	-	-	86,87	

Keterangan: T: target capaian indikator; R: realisasi capaian indikator

Mengacu pada Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2024, penilaian Pembangunan ZI memuat 8 (delapan) indikator untuk masing-masing kategori WBK dan WBBM sebagaimana disajikan dalam Tabel 8. Acuan ini merupakan standar yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah secara nasional dalam Pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. Dari kedelapan indikator tersebut, PPM PKH mempunyai satu indikator yang belum memenuhi kriteria minimal WBK, yaitu Nilai Sub-Komponen “Survey Persepsi Anti Korupsi”. Indikator nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” tahun 2025 sebesar 15,58 dengan nilai survey sebesar 3,56. Hal ini menjadi hambatan bagi PPM PKH sebagai UK Eselon II untuk memperoleh



responden yang mencukupi karena layanan yang diberikan sebagian besar tidak langsung berhubungan dengan masyarakat umum. Dengan tulus pada kelembagaan baru perlu dilakukan identifikasi layanan-layanan mana yang berpotensi dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebagai responden dalam memenuhi Survey Persepsi Anti Korupsi.

Tabel 8. Hasil Penilaian Pembangunan ZI PPM PKH TA 2025 dibandingkan dengan Kriteria Minimal WBK/WBBM yang berlaku Nasional

No	Indikator	WBK	WBBM	Realisasi
1	Nilai Total	75	85	86,87
2	Nilai Minimal Pengungkit	40	48	52,54
3	Bobot Nilai Minimal per Area Pengungkit	60%	75%	77,60%
4	Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih & Akuntabel"	18,25	19,50	19,33
5	Nilai Sub-Komponen "Survey Persepsi Anti Korupsi"	15,75	15,75	15,58
	Nilai Sub-Komponen "Kinerja Lebih Baik"	2,50	3,75	3,75
	Nilai Komponen Hasil "Pelayanan Publik yang Prima"	14,00	15,75	15,01
	Predikat SAKIP dari Evaluasi Internal	B	BB	A

**Sasaran
4**

Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari aspek kualitas implementasi perencanaan anggaran (bobot 20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (bobot 25%). Nilai IKPA menjadi parameter atas penilaian kinerja penganggaran berbasis kinerja dalam satu tahun anggaran. Capaian nilai IKPA untuk masing-masing satker lingkup PPM PKH secara lengkap disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Nilai IKPA UK/UPT Lingkup PPM PKH TA 2025

No	Satker	Target (Nilai)	Realisasi	Capaian (%)
1	PPM PKH	92,00	92,74	100,80
2	BBPM Veteriner	93,42	98,90	105,86
3	BPP Unggas	93,00	95,99	103,21
4	LPP Ruminansia Besar	95,00	99,21	104,43
5	LPP Ruminansia Kecil	92,85	98,76	111,59



Secara umum, capaian kinerja IKPA lingkup PPM PKH telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi nilai IKPA PPM PKH sebesar 92,74 atau mencapai 100,80% dari target yang dikategorikan ke dalam kriteria Baik (89 s.d. 95). Capaian ini diperoleh dari nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. Dibandingkan dengan nilai capaian IKPA tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 menurun 3,42 poin sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja antar Tahun Indikator Nilai IKPA PPM PKH

Sasaran	Indikator		Nilai	
			2024	2025
Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	T	91,44	92,00
		R	96,16	92,74
		%	105,16	100,80

Keterangan: T: target capaian indikator; R: realisasi capaian indikator

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian nilai IKPA PPM PKH tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 98,65% dalam pencapaian target akhir indikator yaitu 94,00 di tahun 2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Nilai IKPA PPM PKH Tahun 2025 terhadap target Renstra PPM PKH 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja		Nilai					Total	Capaian (%)
			2025	2026	2027	2028	2029		
Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	T	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00	98,65
		R	92,74	-	-	-	-	92,74	

Keterangan: T: target capaian indikator; R: realisasi capaian indikator

Nilai IKPA sebesar 92,74 memuat nilai aspek kualitas perencanaan anggaran 93,30%, aspek kualitas pelaksanaan anggaran 87,62%, dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100%. Postur kinerja anggaran PPM PKH yang demikian menggambarkan capaian output yang dapat mengimbangi penyerapan anggaran yang dilakukan (Gambar 2). Serapan anggaran menghasilkan pemenuhan output sejumlah yang ditargetkan. Kinerja berbasis output menjadi komitmen penting dalam penyerapan anggaran PPM PKH. Melalui komitmen tersebut, setiap penggunaan anggaran diupayakan dengan kreativitas desain kegiatan yang mendorong produktivitas dan efisiensi.



No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	100.00	86.60	97.03	60.00	100.00	93.47	100.00	92.74	100%	0.00	92.74
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.99	19.41	6.00	10.00	9.35	25.00				
					Nilai Aspek	93.30		87.62			100.00					

Gambar 2. Capaian Nilai IKPA PPM PKH Tahun 2025

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, capaian IKPA dikategorikan sebagaimana pada Tabel 12.

Tabel 12. Kategori Capaian IKPA

No	Kategori	Capaian IKPA
1	Sangat Baik	≥95
2	Baik	89 s.d. <95
3	Cukup	70 s.d. <89
4	Kurang	<70

Berdasarkan kriteria tersebut UK/UPT lingkup PPM PKH masuk dalam kategori "Baik" dan "Sangat Baik". Detail capaian IKPA lingkup PPM PKH jika dibandingkan dengan standar kategori penilaian IKPA secara nasional sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian IKPA Lingkup PPM PKH TA 2025 Berdasarkan Kategori Penilaian IKPA secara Nasional

No	Satker	Realisasi	Kategori
1	PPM PKH	92,74	Baik
2	BBPM Veteriner	98,90	Sangat Baik
3	BPP Unggas	95,99	Sangat Baik
4	LPP Ruminansia Besar	99,21	Sangat Baik
5	LPP Ruminansia Kecil	98,76	Sangat Baik

Apabila dibandingkan dengan capaian nilai IKPA satker eselon 2A lingkup BRMP, nilai IKPA PPM PKH berada di peringkat ke-3 dari empat satker. Nilai tertinggi dicapai oleh PPMP Hortikultura dengan nilai 99,79, peringkat ke-2 dicapai oleh PPMP Perkebunan dengan nilai 94,68 dan peringkat ke-4 PPMP Tanaman Pangan dengan nilai 91,95.

Pada tahun 2025, dinamika anggaran masih berjalan relatif tinggi karena penyesuaian program baik yang dipengaruhi oleh kebijakan internal BRMP maupun kebijakan yang lebih makro di level Kementerian Pertanian. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran PPM PKH. Ketepatan dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu langkah antisipasi yang dapat



dilakukan tahun 2026 untuk mencapai nilai IKPA yang maksimal. Selain itu, pemahaman mengenai penghitungan nilai IKPA perlu ditingkatkan sehingga diharapkan bisa menyusun strategi dalam pelaksanaan anggaran dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan dalam proses pengendalian capaian target kinerja, PPM PKH melakukan pendekatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik mulai dari tahap perencanaan sampai akhir kegiatan. Hal ini dilakukan guna mendorong berjalannya fungsi pengawasan agar setiap kendala dan permasalahan dapat segera teridentifikasi, mendapatkan alternatif solusi, serta ditindaklanjuti sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi yang digunakan oleh PPM PKH dilakukan melalui rapat rutin manajemen setiap pekan, laporan perkembangan kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Metode-metode tersebut diaktualisasikan dengan optimalisasi pemanfaatan media digital baik dari platform yang telah tersedia maupun melalui pengembangan sendiri dalam bentuk aplikasi sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat berlangsung lebih aktual dan efisien.

3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2025, beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagaimana disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja PPM PKH TA 2025

Sasaran strategis	Indikator	Penyebab keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Meningkatnya kualitas produk usahatani peternakan dan kesehatan hewan	Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi	Tidak ada RO yang mendukung tercapainya sasaran 1, sehingga tidak ada anggaran untuk mengampu kegiatan tersebut	Melakukan koordinasi di lingkup BRMP terkait pembahasan pencapaian sasaran 1, namun tetap tidak dapat diakomodir karena dibutuhkan adanya <i>Trilateral meeting</i> dengan DJA untuk penambahan RO	Tahun 2026 sudah ada penetapan RO untuk sasaran 1 sehingga yang perlu dipastikan adalah alokasi anggaran yang berkaitan dengan RO tersebut, baik yang bersumber dari APBN, PNPB atau PHLN



Sasaran strategis	Indikator	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut
Meningkatnya adopsi teknologi <i>digital, smart farming dan modern</i> dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan	Tidak ada RO yang mendukung tercapainya sasaran 2, sehingga tidak ada anggaran untuk mengampu kegiatan tersebut	Melakukan koordinasi di lingkup BRMP terkait pembahasan pencapaian sasaran 2, namun tetap tidak dapat diakomodir karena dibutuhkan adanya <i>Trilateral meeting</i> dengan DJA untuk penambahan RO	Tahun 2026 sudah ada penetapan RO untuk sasaran 2 sehingga yang perlu dipastikan adalah alokasi anggaran yang berkaitan dengan RO tersebut, baik yang bersumber dari APBN, PNPB atau PHLN
Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan pemahaman mengenai Pembangunan ZI	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki fasilitas layanan publik Memberikan layanan prima kepada stakeholders dengan tetap menjaga integritas Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Pembangunan ZI 	<ol style="list-style-type: none"> Melibatkan Tim APIP dan BPKP dalam pendampingan Pembangunan ZI Membangun kedekatan dengan pengguna layanan dengan menyampaikan berbagai upaya perbaikan Meningkatkan kerja sama dengan stakeholders Meningkatkan inovasi khususnya pada layanan utama
Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	Adanya komunikasi yang efektif antara PPK, pengelola keuangan dan PJ kegiatan, namun pemahaman SDM pengelola keuangan terhadap penilaian IKPA masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan KARWAS online yang menampilkan realisasi anggaran kegiatan secara update Pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan secara optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan anggaran dengan cermat Percepatan pelaksanaan pengadaan dan kontrak, maksimal pada TW 3 Penguatan money anggaran berkala Peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran



3.1.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya diperlukan untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan anggaran dalam menghasilkan output kegiatan yang terukur sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam PK yang telah ditetapkan. Berdasarkan perhitungan efisiensi yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Nilai Efisiensi berada pada rentang skala nilai 0% sampai dengan 20%. Selanjutnya, nilai tersebut perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% sampai dengan 100%. Nilai Efisiensi dihitung berdasarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan:

NE_{SBK} = Nilai Efisiensi SBK

E_{SBK} = Efisiensi SBK

Capaian Nilai Efisiensi SBK penggunaan sumber daya untuk pencapaian kinerja utama di PPM PKH yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu sebagaimana diuraikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Nilai Efisiensi SBK Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Kinerja Utama Lingkup PPM PKH TA 2025

No.	RO	Indeks	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks	Selisih	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi
		SBK				Realisasi Anggaran		Per RO (%)	Per RO (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 4/6	8 = 3-7	9 = 8/3	10
1	6918.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	480.000.000	8.490.000	1	1	8.490.000	471.510.000	98,23	20
2	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	458.000.000	42.415.000	1	1	42.415.000	415.585.000	90,74	20
3	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	45.141.100	1	1	45.141.100	194.858.900	81,19	20

Sumber: Aplikasi Monev Kemenkeu, Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi SBK pada Tabel 15, jika dikonversi menjadi skala 0% - 100% maka Nilai Efisiensi penggunaan sumber daya di PPM PKH menjadi 100%. Adapun Nilai Efisiensi satker lingkup PPM PKH sebagaimana disajikan pada Tabel 16.



Tabel 16. Nilai Efisiensi SBK Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Kinerja Utama Lingkup PPM PKH TA 2025

No	Satker	Nilai Efisiensi (%)
1	PPM PKH	100
2	BBPM Veteriner	100
3	BPP Unggas	100
4	LPP Ruminansia Besar	100
5	LPP Ruminansia Kecil	100

Berdasarkan Tabel 16, Nilai Efisiensi satker lingkup PPM PKH sebesar 100% yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan PPM PKH sudah sangat efisien. Nilai Efisiensi tersebut didukung oleh 3 (tiga) RO SBK yakni 1) RO Layanan BMN; 2) RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi; dan 3) RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk ketiga RO SBK tersebut sangat jauh di bawah SBK namun kegiatan dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari pimpinan dan kontribusi dari setiap bagian di unit kerja.

3.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja PPM PKH tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. IKSK 1: Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi
Pada TA 2025, terdapat program Nilai Tambah dan Daya Saing (NTDSI) yang kegiatannya tercasading di seluruh UPT lingkup PPM PKH yakni kegiatan Penyidikan dan Pengujian Produk. Adapun pendanaan untuk kegiatan tersebut bersumber dari anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru dapat digunakan pada triwulan 3. Jika dikaitkan dengan IKSK 1 PPM PKH, kegiatan ini tidak mendukung secara langsung dengan pencapaian target sehingga tidak bisa dihitung sebagai kinerja di PPM PKH. Berdasarkan hal tersebut, dalam penyusunan rencana program/kegiatan perlu disesuaikan dengan indikator kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya sasaran kegiatan PPM PKH.
2. IKSK 2: Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan
Pada TA 2025, di UPT lingkup PPM PKH terdapat kegiatan produksi bibit sumber dan penyebaran bibit sumber baik melalui diseminasi maupun dijual melalui PNBP. Namun, dalam alokasi pendanaan kegiatan saat ini masuk dalam kegiatan pemeliharaan dan belum tercasading ke dalam RO kegiatan teknis yang secara langsung mendukung tercapainya sasaran



kegiatan PPM PKH. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah mengenai efisiensi anggaran dan program prioritas Kementerian Pertanian yakni swasembada pangan.

3. IKSK 3: Nilai Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada PPM PKH

Dalam mendukung tercapainya target Pembangunan ZI di PPM PKH, telah dilaksanakan program/kegiatan seperti dari akuntabilitas kinerja, SPIP, penataan tatalaksana seperti penyusunan dan implementasi SOP serta keterbukaan informasi publik, penegakan disiplin dan pengembangan kompetensi pegawai, serta penyusunan standar pelayanan. Secara umum, kegiatan sudah berjalan dengan baik namun sebagian kegiatan masih berjalan parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu peta jalan Pembangunan ZI sehingga kontribusinya belum optimal dalam mendukung Pembangunan ZI di PPM PKH.

4. IKSK 4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PPM PKH

Dalam mendukung tercapainya target Nilai IKPA, telah dilaksanakan program/kegiatan seperti perencanaan dan penganggaran yang melibatkan semua penanggung jawab kegiatan di PPM PKH sehingga alokasi dan rencana penarikan anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kegiatan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran secara *real time* melalui inovasi karwas *online*, dan pengendalian internal melalui rapat rutin manajemen mingguan. Namun demikian, nilai IKPA PPM PKH belum maksimal dikarenakan dinamika kebijakan penganggaran dimana pembukaan blokir anggaran di triwulan 2 dan penambahan alokasi anggaran di triwulan 3 menyebabkan terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun yang berdampak negatif terhadap nilai IKPA. Selain itu, terdapat keterlambatan dalam proses pengadaan dan penandatanganan kontrak yang berdampak pada keterlambatan realisasi anggaran dan penyelesaian tagihan, sehingga menurunkan nilai IKPA.

3.1.6. Capaian Kinerja Lainnya

Rancangan Standar Nasional Indonesia

Salah satu fungsi PPM PKH adalah koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pada tahun 2025, PPM PKH telah merumuskan 8 (delapan) SNI, 1 (satu) RSNI3, dan 1 RSNI2 sebagaimana dirinci dalam Tabel 17.



Tabel 17. Fasilitas Perumusan SNI Tahun 2025

No	Komite Teknis	Output	Judul
1	11-16 Kesehatan Hewan	RSNI3	Obat Alami untuk Hewan
2	65-16 Bibit dan Produksi Ternak	SNI	Bibit sapi pasundan
		SNI	Pelayanan Inseminasi Buatan pada Ruminansia Besar
		SNI	Bibit niaga (<i>final stock</i>) umur sehari/kuri (<i>day old chick</i>) – Bagian 2: Ayam ras tipe petelur
		SNI	Ayam Gaosi Agrinak
3	65-17 Pakan Ternak	SNI	Bahan pakan – Hasil samping pengolahan jagung
		SNI	Pakan konsentrat – Domba penggemukan
		SNI	Pakan konsentrat – Kambing perah
		SNI	Bahan pakan – Onggok kering
4	65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner	RSNI2	Rumah potong hewan ruminansia besar

Layanan Pengujian

Salah satu tugas fungsi PPM PKH adalah melaksanakan penilaian kesesuaian SNI di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung tugas ini PPM PKH memiliki 18 unit laboratorium yang melaksanakan layanan pengujian yang tersebar di 4 (empat) UPT lingkup PPM PKH. Sampai dengan akhir TA 2025, UPT lingkup PPM PKH mampu melaksanakan kegiatan pengujian dengan menghasilkan sebanyak 7.881 sampel atau 1.170 Lembar Hasil Uji (LHU) dengan rincian pada Tabel 18.

Tabel 18. Jumlah Layanan Pengujian lingkup PPM PKH Tahun 2025

No	UPT	Jumlah Sampel	Jumlah LHU
1	BBPM Veteriner	3.948	224
2	BPP Unggas	2.448	271
3	LPP Ruminansia Besar	1.235	425
4	LPP Ruminansia Kecil	250	250
	Total	7.881	1.170

Produksi Benih/Bibit Sumber Peternakan dan Hijauan Pakan Ternak

Salah satu kegiatan perakitan dan modernisasi di sub sektor peternakan adalah penyediaan galur ternak dan varietas tanaman pakan unggul sebagai benih/bibit unggul. Benih dan bibit unggul tersebut akan didiseminasikan untuk meningkatkan mutu genetik ternak di lapangan dengan tujuan meningkatkan produktivitasnya. Di tengah tidak adanya alokasi anggaran, UPT lingkup PPM PKH tetap melaksanakan produksi bibit sumber peternakan



sebanyak 230.026 ekor dan bibit tanaman pakan ternak dengan rincian pada Tabel 19 dan 20.

Tabel 19. Produksi Bibit Ternak Lingkup PPM PKH TA 2025

No	Komoditas	Produksi (ekor)
1	Sapi	73
2	Kerbau	1
3	Kambing	396
4	Ayam	195.105
5	Itik	34.022
6	Kelinci	429
	Jumlah	230.026

Tabel 20. Produksi Bibit Tanaman Pakan Ternak Lingkup PPM PKH TA 2025

No	Komoditas	Produksi
1	Benih Indigofera	5 kg
2	Bibit Indigofera	10.000 polybag

Pendampingan Swasembada Pangan

Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/KP.250/A/09/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, Kepala PPM PKH mendapat tugas sebagai penanggung jawab Provinsi Aceh sekaligus sebagai penanggung jawab di 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Bireun pada Kegiatan Swasembada Pangan tahun 2025. Selain itu, UPT lingkup PPM PKH juga ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan yaitu Kepala BPP Unggas sebagai penanggung jawab Kabupaten Purwakarta, Kepala LPP Ruminansia Besar sebagai penanggung jawab Kabupaten Sampang, dan Kepala LPP Ruminansia Kecil sebagai penanggung jawab Kabupaten Aceh Besar. Sesuai dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan tanggal 07 Maret 2025 maka kegiatan pendampingan secara efektif dilaksanakan mulai bulan April 2025. Capaian realisasi untuk masing-masing UK/UPT lingkup BRMP sebagaimana pada Lampiran 9.

Total realisasi LTT padi di Provinsi Aceh sejak bulan April sampai dengan Desember 2025 mencapai 241.431,43 hektar. Apabila dibandingkan dengan total target bulan April sampai dengan Desember 2025 sebesar 327.874,04 hektar maka realisasi LTT mencapai 73,63% yang masuk dalam kategori "kuning" (50-85%).



Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Peternakan 2024

Komitmen Indonesia dalam meningkatkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tertuang dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) yang telah disampaikan pada September 2022. Komitmen Indonesia diperkuat melalui dokumen NDC pertama pada November 2016 dengan penetapan target tanpa syarat sebesar 29% dan target bersyarat hingga 41% dibandingkan dengan skenario *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2030. Dokumen ENDC yang diterbitkan pada September 2022 bertujuan untuk memperbaharui kebijakan nasional terkait perubahan iklim, termasuk dari sektor pertanian. Komitmen Indonesia dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk percepatan target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

PPM PKH terlibat dalam kegiatan inventarisasi dan mitigasi gas rumah kaca sektor pertanian khususnya di sub sektor peternakan. Upaya mitigasi yang dilakukan saat ini di sub sektor peternakan berupa perbaikan kualitas pakan untuk mengurangi emisi CH₄ dari fermentasi enterik. Terdapat beberapa pemutakhiran data aktivitas yang digunakan dalam perhitungan emisi GRK sub sektor peternakan tahun 2024 yakni: (1) data persentase kelompok umur ternak sapi potong, sapi perah, dan kerbau menggunakan data Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018; (2) untuk program hijauan pakan dibagi menjadi dua yakni rumput gajah dan legum. Faktor koreksi rumput gajah yaitu 0,18 (dengan asumsi bahwa ternak mengkonsumsi rumput gajah 100% untuk menggantikan jerami atau rumput lapang) dan faktor koreksi legum yaitu 0,11 (dengan asumsi bahwa ternak mengkonsumsi legum 30% dan pakan basal (jerami atau rumput lapang) 70%); (3) faktor koreksi untuk penggunaan konsentrat yaitu 0,08; dan (4) luasan lahan dan volume program aksi mitigasi diakumulasikan dengan program tahun sebelumnya dengan justifikasi bahwa program pada tahun sebelumnya masih berlanjut sampai dengan tahun 2024 dan untuk lokasi program tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa program pakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Kegiatan tersebut diantaranya perbaikan kualitas pakan melalui pemberian pakan hijauan seluas 2.913 ha (akumulasi program tahun 2021 seluas 898 ha, tahun 2022 seluas 160 ha, tahun 2023 seluas 1.374 ha, dan tahun 2024 seluas 1.260 ha) dan pakan konsentrat sebanyak 38.445 ton (akumulasi program tahun 2021 sebanyak 10.172 ton, tahun 2022 sebanyak 13.018 ton, tahun 2023 sebanyak 11.418 ton, dan tahun 2024 sebanyak 3.837 ton). Program ini diberikan kepada kelompok peternak sapi potong dewasa di beberapa provinsi di Indonesia. Adopsi program tersebut di tingkat petani



diperkirakan sekitar 20 kali. Hal ini berdasarkan hasil verifikasi lapang Tim Inventory GRK Puslitbangnak tahun 2017 di Kabupaten Subang.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa total estimasi emisi CH₄ dari fermentasi enterik pada tahun 2024 sebesar 585.997.040 kg CH₄/tahun atau setara dengan 16,41 juta ton CO₂-e/tahun sebagaimana dirinci pada Tabel 19. Total emisi CH₄ dari fermentasi enterik tahun 2024 meningkat 5,435 juta ton CO₂-e/tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang dikarenakan adanya peningkatan populasi ternak sebesar 20,60% dari populasi ternak tahun 2023. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa faktor kualitas pakan, jenis dan status fisiologis ternak, serta lingkungan perlu mendapatkan perhatian agar dapat menurunkan emisi gas CH₄. Pemilihan bahan pakan yang tepat serta cara pemberian yang sesuai dengan kemampuan ternak mencernanya merupakan strategi mitigasi gas CH₄ yang dapat dilakukan. Pengelolaan mekanisme pembentukan gas CH₄ oleh bakteri metanogenik adalah kunci dalam pengaturan produksi gas CH₄, apakah harus mitigasi atau akselerasi sesuai dengan pemanfaatan gas CH₄ tersebut.

Tabel 21. Hasil Penghitungan Emisi CH₄ dari Fermentasi Enterik menggunakan Tier-2 pada Berbagai Kelompok Umur Ternak Tahun 2024

Ternak	Level Fisiologi/Umur Sub-Category	Populasi	FE untuk CH ₄ Fermentasi Enterik (kg CH ₄ /ekor/tahun)	Emisi CH ₄ (kg CH ₄ /tahun)
Sapi potong	anak (0-1 th)	2.126.710	18,18	38.671.885
	pertumbuhan (1-2 th)	2.955.070	27,18	80.313.475
	muda (2-4th)	2.248.908	41,77	93.944.304
	dewasa (>4 th)	3.319.313	55,89	185.539.298
	Imported (Penggemukan)	1.099.779	25,49	28.031.068
	Jumlah	11.749.780		426.500.030
Sapi perah	anak (0-1 th)	90.749	16,55	1.501.971
	Pertumbuhan/muda (1-2 th)	108.821	35,06	3.814.760
	muda (2-4 th)	111.396	51,96	5.788.237
	dewasa (>4 th)	174.843	77,14	13.488.167
	Jumlah	485.809		24.593.135
Kerbau	anak (0-1 th)	75.334	20,55	1.548.352
	Pertumbuhan (1-2 th)	119.544	41,11	4.913.998
	muda (2-4 th)	82.461	61,66	5.084.508
	dewasa (> 4 th)	279.455	82,21	22.974.715
	Jumlah	556.794		34.521.572
Kambing	Anak	4.059.478	1,31	5.298.431
	Pertumbuhan	4.125.460	4,33	17.864.894
	Dewasa	7.525.116	5,25	39.508.366
	Jumlah	15.710.055		62.671.691
Domba	Anak	2.255.010	2,30	5.177.955
	Pertumbuhan	2.460.598	2,65	6.516.156



Ternak	Level Fisiologi/Umur <i>Sub-Category</i>	Populasi	FE untuk CH ₄ Fermentasi Enterik (kg CH ₄ /ekor/tahun)	Emisi CH ₄ (kg CH ₄ /tahun)
	Dewasa	4.503.567	3,27	14.728.917
	Jumlah	9.219.176		26.423.028
Babi	Anak	1.546.017	0,43	669.580
	Muda	1.248.500	1,03	1.284.831
	Dewasa	1.320.513	1,28	1.688.276
	Jumlah	4.115.030		3.642.687
Kuda	Anak	23.676	25,99	615.299
	Muda	28.456	53,27	1.515.829
	Dewasa	73.668	74,85	5.513.769
	Jumlah	125.800		7.644.897
			(kg CH ₄ /tahun)	585.997.040
			(ton CH ₄ /tahun)	585.997,040
			(Juta Ton CH ₄ /tahun)	0,585997

Perhitungan emisi aksi mitigasi dilakukan dengan beberapa asumsi yakni: (1) penggunaan pada ternak sapi potong dewasa dengan bobot badan 350 kg; (2) hijauan berupa rumput gajah dengan produksi 150 ton/ha/tahun dan legum dengan produksi 180 ton/ha/tahun. Ternak penerima manfaat program rumput gajah dihitung melalui pembagian antara produksi rumput gajah dengan kebutuhan pakan sapi dewasa (10% dari bobot badan yaitu 35 kg/ekor/hari, Ditjen PKH), sedangkan untuk program legum dihitung melalui pembagian antara produksi legum dengan kebutuhan pakan sapi dewasa (asumsi penggunaan legum sebanyak 30% dari kebutuhan pakan sapi dewasa yaitu 30% x 35 kg/ekor/hari, Ditjen PKH); dan (3) ternak penerima manfaat program konsentrat dihitung melalui pembagian antara jumlah konsentrat (ton/tahun) dengan kebutuhan konsentrat sapi dewasa (3,5 kg/ekor/hari, Ditjen PKH).

Berdasarkan asumsi tersebut dan rekomendasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terkait konsumsi pakan, diperoleh jumlah ternak yang menerima manfaat untuk pakan hijauan sekitar 74.600 ekor, dan konsentrat sebanyak 30.094 ekor. Capaian penurunan emisi CH₄ enterik melalui program pakan Ditjen PKH sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,6388 juta ton CO₂-e. Berdasarkan capaian penurunan emisi tersebut, emisi nasional setelah aksi mitigasi sebesar 20,439 juta ton CO₂-e sebagaimana disajikan pada Tabel 22.



Tabel 22. Emisi GRK Subsektor Peternakan setelah Aksi Mitigasi di Indonesia Tahun 2024

No.	Emisi Nasional <i>Baseline</i> (juta ton CO ₂ -e)	Penurunan Emisi (juta ton CO ₂ -e)		Total Penurunan Emisi s/d Tahun 2022 (juta ton CO ₂ -e)	Emisi Nasional (juta ton CO ₂ -e)
		Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Hijauan Pakan Ternak		
1	21,08	0,075361	0,563478	0,638838	20,439

Penghargaan

Sertifikasi ISO 9001:2015

Pada tahun 2025 PPM PKH dan LPP Ruminansia Kecil berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2015. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen UK dan UPT lingkup PPM PKH dalam menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam proses audit, PPM PKH dinilai mampu menunjukkan kinerja positif, meski masih terdapat beberapa catatan observasi yang perlu ditindaklanjuti, khususnya terkait mitigasi risiko dan kelengkapan dokumen. Perwakilan lembaga sertifikasi memberikan apresiasi atas keberanian dan komitmen manajemen PPM PKH yang dinilai memiliki potensi besar untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan. Sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen manajemen untuk meningkatkan tata kelola organisasi, memperkuat integrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mempersiapkan transisi menuju ISO 9001:2026 yang akan menyesuaikan dengan isu perubahan iklim global.



Gambar 3. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 PPM PKH (kiri) dan LPP Ruminansia Kecil (kanan)



Sertifikasi ISO 17025

Sarana laboratorium yang terdapat di BPP Unggas antara lain Laboratorium Pelayanan Kimia. Laboratorium tersebut telah terakreditasi sejak tanggal 23 Maret 2007 dengan No. Sertifikat LP -347-IDN dan mendapatkan akreditasi SNI ISO / IEC 17025. Pada tahun 2025, telah dilakukan reakreditasi pada bulan Januari 2025 dan telah mendapatkan sertifikat yang berlaku hingga 30 Juni 2030. Laboratorium pelayanan kimia dalam praktik kerjanya selalu berkomitmen memberikan pelayanan berdasarkan standar ISO/IEC 17025:2017 dengan tujuan untuk menjamin hasil analisa yang dikeluarkan agar sesuai dengan standar yang berlaku.



Gambar 4. Sertifikat Akreditasi LP-347-IDN (Amd) BPP Unggas

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

PPM PKH beserta UPT lingkup kembali meraih predikat sebagai badan publik yang "Informatif" pada Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 22 Desember 2025. Dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian kategori Eselon II, BBPM Veteriner meraih peringkat ke-6 dan PPM PKH meraih peringkat ke-15. Sedangkan pada kategori Eselon III, LPP Ruminansia Besar berhasil meraih peringkat ke-19, disusul oleh LPP Ruminansia Kecil di peringkat ke-53 dan BPP Unggas di peringkat ke-59.

Capaian ini merupakan wujud komitmen PPM PKH dan seluruh UPT-nya dalam membangun dan mengimplementasikan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses sebagai bentuk salah satu bentuk tanggung jawab badan publik kepada masyarakat. UK dan UPT lingkup PPM PKH berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.



Gambar 5. Penerimaan penghargaan sebagai badan publik yang "Informatif" pada Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup Kementerian Pertanian 2025

Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2025

PPM PKH berhasil meraih peringkat ke-3 sebagai Satker terbaik berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Kementerian Pertanian tahun 2025. Predikat menuju WBK adalah penghargaan bagi unit kerja pemerintah yang memenuhi sebagian besar kriteria pembangunan ZI, mencakup manajemen perubahan, penataan tatalaksana, SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik, sebagai langkah awal menuju WBBM dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen seluruh elemen organisasi dalam Pembangunan ZI sebagai komitmen pencegahan korupsi dan untuk mencapai satker WBK.



Gambar 6. Penerimaan penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK 2025

Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025

UPT lingkup PPM PKH berhasil mendapatkan penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh KemenpanRB. BBPM Veteriner dan BPP Unggas masuk dalam nominasi mewakili Kementerian Pertanian. BBPM Veteriner mengusung inovasi berjudul "Vaksin VIRDUO AI: Dua Perlindungan Melawan Avian Influenza" sedangkan BPP Unggas mengusung inovasi dengan judul "Janaka Agrinak (Ayam Galur KUB-2)".



Gambar 7. Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025

Penghargaan sebagai Pionir Inpro V6 dari Biro Pengadaan Kementan

BPP Unggas di tahun 2025 berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Pionir Inpro V6 dari Biro Pengadaan Kementerian Pertanian. Inpro V6 merupakan platform pengadaan barang/jasa pemerintah nasional yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan dikelola bersama Telkom Indonesia. Platform ini menggantikan sistem lama INAPROC untuk belanja pemerintah yang menawarkan proses yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.



Gambar 8. Penghargaan sebagai Pionir Inpro V6 Tahun 2025



Penghargaan Layanan Perpustakaan

BBPM Veteriner meraih Penghargaan Juara III Perpustakaan Terinspirasi Tahun 2025 pada lingkup Kementerian Pertanian. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi BBPM Veteriner dalam mengembangkan perpustakaan sebagai pusat informasi, pengetahuan, dan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan pengguna.

Di tahun 2025 LPP Ruminansia Kecil juga mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat Akreditasi Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan LPP Ruminansia Kecil meraih akreditasi A yang berlaku selama 5 tahun terhitung sejak 16 September 2025. Akreditasi perpustakaan bertujuan untuk menjamin kualitas layanan serta pengelolaan perpustakaan yang berdampak pada peningkatan kepercayaan pemustaka, profesionalisme pengelola, dan citra perpustakaan, serta mendorong pengembangan literasi dan penyebaran informasi. Oleh karena itu, Akreditasi bukan sekadar formalitas administratif tetapi langkah strategis untuk memastikan perpustakaan relevan dan efektif dalam mendukung penyediaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 9. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan LPP Ruminansia Kecil

Penghargaan Satuan Kerja Loka Terbaik Tahun 2025

LPP Ruminansia Besar berhasil meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Loka Terbaik lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025. Penentuan unit kerja terbaik didasarkan pada capaian dan kualitas kinerja serta beberapa aspek lainnya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi, memotivasi peningkatan kinerja, mendorong akuntabilitas, dan menjadi teladan bagi satker lainnya.



Gambar 10. Sertifikat Penghargaan Satker Loka Terbaik 2025 lingkup BRMP

3.2. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2025, lingkup PPM PKH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp65.894.398.000,- yang mengalami beberapa kali revisi anggaran selama tahun berjalan. Sampai dengan revisi terakhir, pagu anggaran lingkup PPM PKH menjadi Rp72.669.009.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp2.435.992.000,- atau 3,35% dari pagu total yang teralokasi di akun belanja barang. Alokasi anggaran lingkup PPM PKH bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp69.632.677.000,- dan PNBP sebesar Rp3.036.332.000,- dengan rincian per jenis belanja sebagaimana disajikan pada Tabel 23 sedangkan rincian per Indikator Kinerja dan RO kegiatan disajikan pada Tabel 24.

Tabel 23. Rincian Pagu Anggaran UK/UPT Lingkup PPM PKH TA 2025 per Jenis Belanja

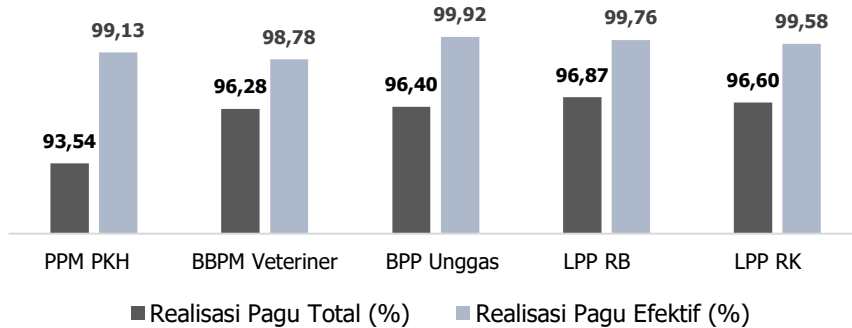
No	UPT	Pagu Total (Rp.000)	Pagu (Rp.000)		
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
1	PPM PKH	9.913.970	2.970.563	6.943.407	
2	BBPM Veteriner	17.626.504	5.440.441	12.186.063	
3	BPP Unggas	18.175.781	3.847.295	13.975.856	352.630
4	LPP Ruminansia Besar	15.723.315	3.631.613	12.091.702	
5	LPP Ruminansia Kecil	11.229.439	2.315.515	8.913.924	
	Total	72.669.009	18.205.427	54.110.952	352.630



Tabel 24. Rincian Pagu Anggaran Lingkup PPM PKH TA 2025 per IKS

No	Indikator Kinerja	RO	Pagu Anggaran (Rp.000)		
			Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu Efektif
1	Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi	Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.036.332	0	3.036.332
		Jumlah	3.036.332	0	3.036.332
2	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, <i>smart farming</i> dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Peternakan	-	-	-	-
		Jumlah	0	0	0
3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	5.375.000	2.043.812	3.331.188
		Layanan BMN	50.000	6.248	43.752
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	159.210	48.700	110.510
		Layanan Umum	1.391.170	286.882	1.104.288
		Layanan Perkantoran	62.482.677	0	62.482.677
		Jumlah	69.458.057	2.385.642	67.072.415
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	174.620	50.350	124.270
		Jumlah	174.620	50.350	124.270
Grand Total			72.669.009	2.435.992	70.233.017

Total realisasi berdasarkan *cut off* aplikasi OM-SPAN tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp69.845.742.925,- atau sebesar 99,45% dari pagu efektif yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp66.813.657.363,- (95,66%) dan PNBP sebesar Rp3.032.085.562,- (4,34%). Rincian realisasi masing-masing satker lingkup PPM PKH terhadap pagu total dan pagu efektif disajikan pada Gambar 11.



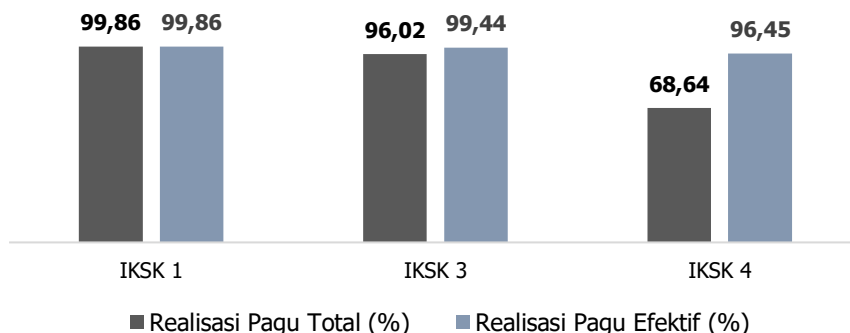
Gambar 11. Realisasi Anggaran terhadap Pagu Total dan Pagu Efektif di Satker Lingkup PPM PKH 2025

Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran Belanja Pegawai lingkup PPM PKH sebesar 99,36%; Belanja Barang sebesar 95,00% dan Belanja Modal sebesar 99,58% dari pagu total dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Lingkup PPM PKH TA 2025

No	Satker	Realisasi (Rp)			Total (Rp)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1	PPM PKH	2.939.720.851	6.333.625.528	-	9.273.346.379
2	BBPM Veteriner	5.429.382.917	11.542.258.115	-	16.971.641.032
3	BPP Unggas	3.844.540.257	13.325.317.994	351.136.300	17.520.994.551
4	LPP Ruminansia Besar	3.600.101.424	11.631.657.490	-	15.231.758.914
5	LPP Ruminansia Kecil	2.275.453.849	8.572.548.200	-	10.848.002.049
	Jumlah	18.089.199.298	51.405.407.327	351.136.300	69.845.742.925

Adapun berdasarkan IKSK, pagu dan realisasi anggaran disajikan pada Gambar 12 yang terdiri atas 3 (tiga) IKSK. Adapun untuk IKSK 2 tidak ditampilkan karena tidak ada alokasi anggarannya.



Keterangan

- IKSK 1: Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi (%)
- IKSK 3: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nilai)
- IKSK 4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nilai)

Gambar 12. Realisasi Anggaran terhadap Pagu Total dan Pagu Efektif per IKSK Lingkup PPM PKH TA 2025

3.2.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di luar pajak, pada awal TA 2025 telah ditetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup PPM PKH sebesar Rp3.824.032.000,- dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 26. Selama TA 2025, telah diterima dan disetorkan PNBP sebesar Rp5.433.143.816,- atau tercapai 142,08% dari target yang direncanakan. Penerimaan tersebut bersumber dari layanan uji laboratorium dan penjualan ternak yang merupakan sumber utama PNBP di UPT lingkup PPM PKH.

Tabel 26. Target dan Realisasi PNBP Fungsional Lingkup PPM PKH TA 2025

No	Satker	Target	Realisasi	Capaian
1	BBPM Veteriner	301.500.000	438.889.050	145,57
2	BPP Unggas	1.750.006.000	2.833.841.034	161,93
3	LPP Ruminansia Besar	1.127.526.000	1.472.685.032	130,61
4	LPP Ruminansia Kecil	645.000.000	687.728.700	106,62
Total		3.824.032.000	5.433.143.816	142,08